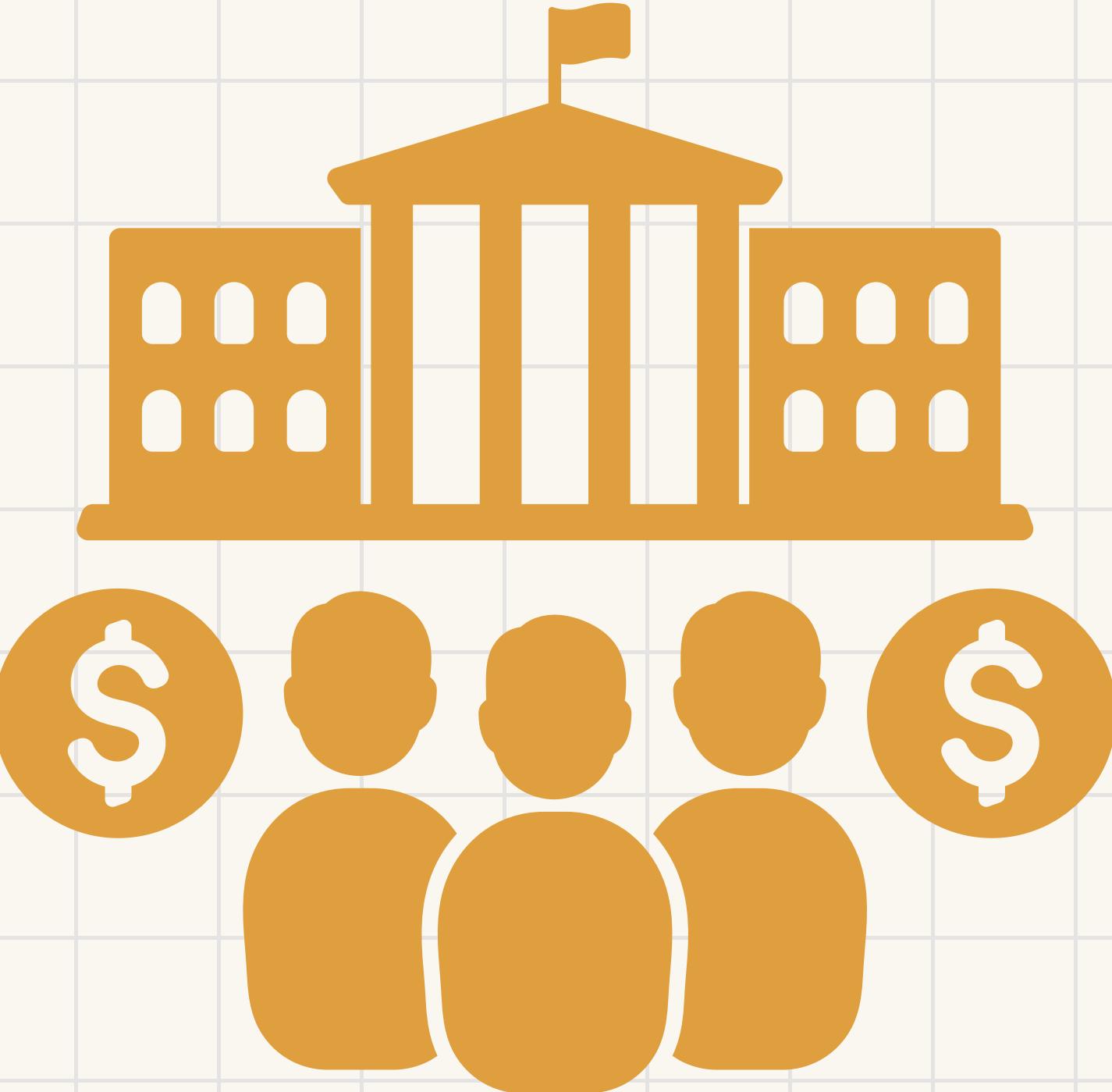


KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

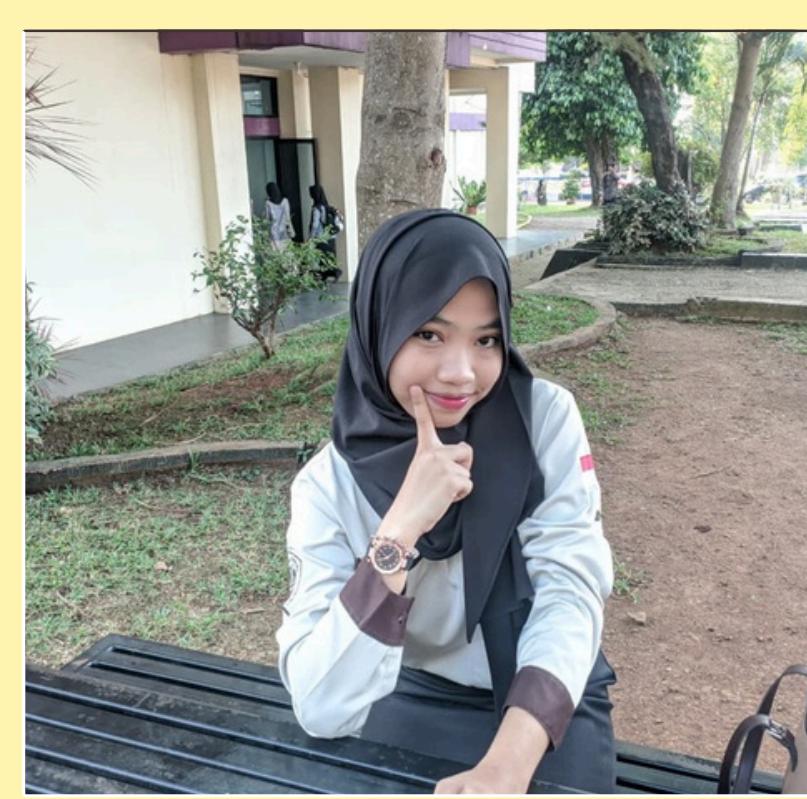


DISUSUN OLEH KELOMPOK 1

Anggota Kelompok



**Zulfaa Salsabillah
(2313031038)**



**Lilin Ratnasari
(2313031056)**

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK

Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan produksi barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat (perspektif ilmu ekonomi). Berbeda dengan sektor swasta, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, bukan mencari laba

Domain publik memiliki wilayah yang sangat luas dan kompleks, meliputi:

- **Badan Pemerintahan (Pusat & Daerah)**
- **BUMN dan BUMD**
- **Organisasi Nirlaba (Yayasan, LSM, Universitas)**
- **Organisasi Politik**



SIFAT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK

Aspek

Karakteristik Sektor Publik

Tujuan

Non-profit motive (Pelayanan publik, ketertiban, kesejahteraan)

Sumber Dana

Bersumber dari masyarakat (Pajak, retribusi, hibah, utang pemerintah)

Pertanggungjawaban

Kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)

Sifat Kegiatan

Penyediaan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur)

Prinsip Utama

Akuntabilitas Publik: Kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan dana kepada publik.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEKTOR PUBLIK

Faktor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, nilai tukar, infrastruktur, dan pendapatan per kapita sangat memengaruhi penerimaan dan belanja negara.

Faktor Kultural (Budaya)

Keragaman suku, agama, dan nilai memengaruhi pola pelayanan. Contoh: Pendekatan kultural khusus diperlukan untuk program vaksinasi

Faktor Politik

Dinamika politik memengaruhi anggaran dan kebijakan. Contohnya APBN/APBD harus mendapat persetujuan DPR/DPRD

Faktor Demografi

Struktur usia, pertumbuhan, dan mobilitas penduduk menentukan arah kebijakan. Contohnya, Kebijakan difokuskan pada lapangan kerja untuk usia produktif.

PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK VS SWASTA

Aspek	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan	Non-profit (Pelayanan publik)	Profit (Maksimisasi laba)
Sumber Dana	Pajak, retribusi, utang pemerintah	Modal sendiri, utang bank, saham
Pertanggungjawaban	Kepada masyarakat dan parlemen	Kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Org	Birokratis dan hierarkis	Fleksibel dan datar
Anggaran	Terbuka untuk umum	Tertutup (rahasia perusahaan)
Sistem Akuntansi	Cash Towards Budget	Accrual Basis

PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA

Sumber Daya Terbatas

Tunduk pada Hukum

Kebutuhan Informasi

**Proses Pengendalian
Manajemen**

**Bagian dari Sistem
Ekonomi**

TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Management Control

Pengendalian penggunaan sumber daya

Accountability

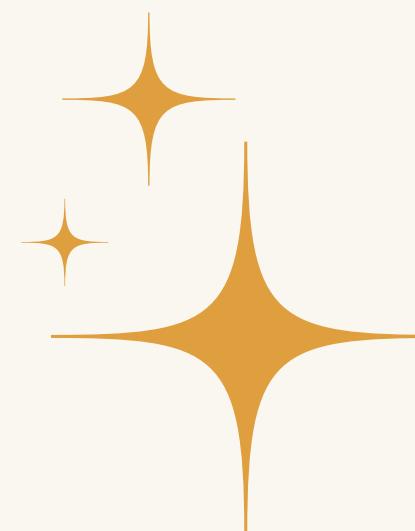
Pertanggungjawaban keuangan dan kinerja

Transparency

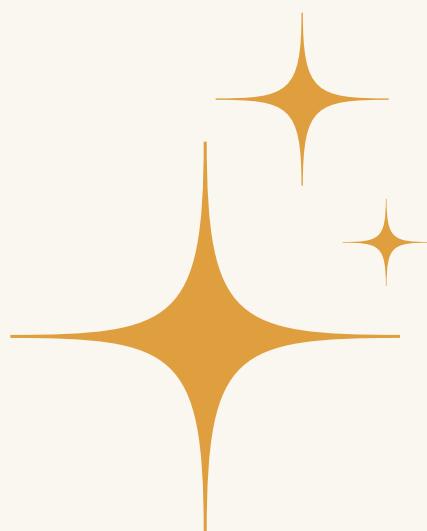
Keterbukaan informasi keuangan

Performance Evaluation

Evaluasi efisiensi dan efektivitas program



STUDI KASUS



Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dicanangkan pemerintah pada tahun 2011 dengan tujuan menciptakan data kependudukan tunggal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki sistem administrasi negara. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 5,9 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek e-KTP penuh dengan permasalahan: distribusi kartu yang terlambat, kualitas chip yang rendah, serta penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya praktik korupsi besar-besaran dengan melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, hingga pihak swasta. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 2,3 triliun. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Proyek yang semestinya meningkatkan legitimasi birokrasi justru memperlihatkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi sektor publik.

Bagaimana akuntansi sektor publik dapat berperan secara strategis untuk mencegah terjadinya kasus korupsi seperti proyek e-KTP, dengan mempertimbangkan fungsi management control dan accountability ?

**TERIMA
KASIH**